

## BAB I HAKEKAT PENDIDIKAN POLITIK

### A. Makna Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik (*political education*) merupakan gabungan dari dua kata yakni pendidikan dan politik. Banyak definisi yang telah mendeskripsikan kedua istilah tersebut.

Pengertian pendidikan menurut beberapa pendapat

1. Pendidikan menurut Lengeveld adalah membimbing anak didik dari tingkat belum dewasa menuju ke kedewasaan. Berarti kriteria keberhasilan pendidikan adalah kedewasaan.
2. Ki Hajar Dewantara, menyatakan pendidikan sebagai “daya upaya untuk mewujudkan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran (intelektual)) dan tubuh anak untuk memajukan kehidupan anak didik selaras dengan dunianya” .
3. Pendidikan sebagai bagian dari kehidupan agar menjadi manusia adalah penerusan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat disebarluaskan kepada satu generasi ke generasi penerus suatu bangsa, atau dengan kata lain adalah kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya (Tirtaharja dan Lusulo, 2005:33).
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan suatu upaya untuk memasyarakatkan sesuatu hal agar menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2003)

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polistaia*. *Polis* berarti negara kota, yakni suatu masyarakat yang mampu mengurus diri sendiri atau mandiri, sedangkan *taia* berarti urusan. Jadi politik dapat diartikan segala urusan yang berkenaan dengan negara, termasuk di dalamnya masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan maupun pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam penggunaan sehari-hari istilah politik sering mempunyai arti yang berbeda-beda. Hal demikian, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konteks penggunaan, maupun unsur kepentingan para pengguna itu sendiri. Kendatipun demikian, dalam konteks keilmuan, perbedaan penggunaan konsep politik ini, dapat dikategorisasikan sebagai berikut :

#### a. Politik dalam arti kepentingan

Manusia memiliki kebutuhan atau keinginan. Dengan berbagai tindakan dan perilakunya, manusia kerap melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kebutuhan atau keinginannya. Menurut Deliar Noer (1983) keinginan itu bisa terwujud dalam bentuk yang lebih keras, yaitu kepentingan. Politik adalah masalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (Harold Laswell)

#### **b. Politik dalam arti kebijakan**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa (a) masalah politik tidak bisa dilepaskan dari konteks kemasyarakatan, (b) interaksi antar kepentingan, dan (c) upaya untuk perjuangan kepentingan. Maka salah satu perkembangan ilmu politik itu, adalah adanya penguatan makna politik sebagai sebuah kebijakan. Artinya, politik bukan diartikan sebagai satu perjuangan kepentingan atau usaha mempertahankan kepentingan, tetapi erat kaitannya dengan ‘bagaimana membangun sebuah regulasi atau mekanisme pengelolaan kepentingan publik dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak’.

Dalam pengertian yang lebih luas, politik berkenaan dengan konsep-konsep pokok sebagai berikut; negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian (Mirriam Budiardjo, 1977). Sedangkan istilah politik dalam konteks pendidikan politik bukanlah politik dalam artian segala sesuatu yang berhubungan dengan proses menetapkan atau melaksanakan kebijakan negara, tetapi “kebijakan atau langkah yang diambil dalam usaha memilih dan mencapai tujuan negara” (Soerono, 1981).

Berikut ini definisi **pendidikan politik** menurut beberapa pendapat.

1. Pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi yang kemudian (M Panggabean, 1981)
2. Pendidikan politik adalah usaha memasyarakatkan politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara (Soerono, 1982)
3. Pendidikan politik adalah pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara (L Soetanto, 1982)
4. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun” (Alfian ,1986).
5. Pendidikan politik adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara moral/etis dalam mencapai tujuan politik (Kartini Kartono, 1986)
6. Pendidikan politik merupakan proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma, simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik (Ramlan Surbakti, 1992)

7. Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa dan negara serta seluruh perangkat sistem maupun perangkat kelembagaan yang ada (Kosasih Djahiri, 1995)
8. Pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Azis Wahab, 1996)
9. Pendidikan politik sebagai “Upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya” (Rusadi Kantaprawira, 2004)
10. Pendidikan politik adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan sengaja, terencana, bisa bersifat formal dan informal, dilakukan terus menerus dari generasi ke generasi agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab (Sunarso, 2007)
11. Pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*) (Endang Sumantri, 2010)
12. Pendidikan politik menurut Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda, sebagai berikut: “Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien”
13. Pendidikan politik menurut Permendagri No. 36 tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, sebagai berikut: “ proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

**Definisikan konsep pendidikan politik menurut anda sendiri!**

*The aim of political education is to get people interested in politics and to lay down the foundations which will allow pupils and students to become responsible citizens by attempting to teach them how to analyze and assess a given political situation independently.*  
 (<http://www.dadalos.org/int/uebersicht.htm>)

**Maksud dan tujuan pendidikan politik** adalah menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, cinta tanah air, kebanggaan berbangsa dan bernegara, menyegarkan kembali jiwa yang cinta damai dan cinta kemerdekaan serta menjunjung tinggi ideologi negara dan menghormati kepada pemerintah disertai tawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (Endang Sumantri, 2010)

Tujuan pendidikan politik bagi generasi muda sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 12 tahun 1982 adalah sebagai berikut: menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya akan tercermin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadiannya sebagai berikut:

1. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui keteladanan.
2. Secara sadar taat pada hukum dan Undang-Undang Dasar.
3. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
4. Berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan kepada kemampuan objektif bangsa.
5. Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis.
6. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha.
7. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
8. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang.
9. Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan tujuan atau sasaran penyelenggaraan pendidikan politik menurut Permendagri No. 36 Tahun 2010 adalah

- a. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
- c. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

## **B. Hubungan Pendidikan Dengan Politik**

Kehidupan politik sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan, sebaliknya pendidikan adalah institusi penting dalam hal pengembangan bidang politik. Pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik. Pendidikan dan

sekolah adalah pencerminan kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. Tujuan pendidikan erat kaitannya dengan filsafat negara dan tujuan politik negara. Pendidikan juga merupakan penjabaran dan filsafat negara dan tujuan politik negara.

Pendidikan itu tidak bisa netral. Artinya pendidikan bisa dipakai sebagai instrumen untuk mencapai kebebasan, atau justru digunakan sebagai alat memperbudak, menindas dan membelenggu manusia oleh pihak-pihak yang berkuasa. Pendidikan sering menjadikan anak sebagai objek, untuk tujuan politik atau komersial tertentu. Dalam kondisi ini pendidikan berubah wujud menjadi anti pendidikan disertai usaha humanisasi.

Pendidikan merupakan aspek penting dari suatu kebijakan publik (public policy). Politik pendidikan pada dasarnya mencakup pemikiran, gagasan, pendekatan dan cara-cara yang ditempuh suatu bangsa dalam mendidik warganegaranya (Azis Wahab, 1996). Langkah pendidikan yang tergambar dilaksanakan pemerintah melalui departemen pendidikan. Dari departemen inilah politik pendidikan dipikirkan, direncanakan dan disebarluaskan untuk menjadi bahan rujukan instansi yang ada dibawahnya.

### **C. Hubungan Pendidikan Politik Dengan Pendidikan Kewarganegaraan**

PKn dalam literatur asing disebut citizenship education (arti luas) dan civic education (arti sempit). Berikut ini definisi PKn dari para ahli Indonesia

PKn diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2000)

PKn sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 (Numan Somantri, 2001)

PKn didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan (Udin S Winataputra, 2005)

Pendidikan Kewarganegaraan diakui sebagai bidang yang multifacet atau multidimensional. Ia dapat bersifat lintas disiplin keilmuan, atau interdisipliner. Dengan demikian PKn bisa mengemban beberapa fungsi atau misi pendidikan, sebagai berikut;

- ✓ Pendidikan kebangsaan

- ✓ Pendidikan demokrasi
- ✓ Pendidikan politik
- ✓ Pendidikan hukum atau kesadaran berkonstitusi
- ✓ Pendidikan multikultural
- ✓ Pendidikan nilai
- ✓ Pendidikan kewarganegaraan
- ✓ Pendidikan damai atau resolusi konflik
- ✓ Pendidikan anti korupsi
- ✓ Dan lain-lain

Pendidikan kewarganegaraan atau *citizenship education* sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam **lima status**. **Pertama**, sebagai mata pelajaran di sekolah. **Kedua**, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. **Ketiga**, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. **Keempat**, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu crash program. **Kelima**, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat (Udin Winataputra, 2001)

Jika *citizenship education* diartikan dalam arti luas, maka “political education” merupakan salah satu dimensi dari *citizenship education* (Cogan & Dericott, 1998)

#### **D. Hubungan Pendidikan Politik Dan Sosialisasi Politik**

Berbagai pengertian dan batasan mengenai sosialisasi politik banyak dikemukakan para sarjana terkemuka. Pada dasarnya pengertian-pengertian yang disampaikan tidak jauh berbeda. Berikut berbagai pengertian mengenai sosialisasi politik.

a. Menurut Kenneth P Langton

Sosialisasi politik dalam pengertian luas merujuk pada cara masyarakat dalam mentransmisikan budaya politiknya dari generasi ke generasi

b. Menurut Gabriel Almond

Sosialisasi politik menunjuk pada proses dimana sikap-sikap dan pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merp sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan – keyakinan politik pada generasi berikutnya.

c. Menurut Richard E Dawson

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana

sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa

d. Menurut Denniss Kavanagh

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu belajar tentang politik dan mengembangkan orientasinya terhadap politik

e. Menurut Prewitt & Dawson

Sosialisasi politik didefinisikan sebagai proses bagaimana warga negara memperoleh pandangan-pandangan politik yang merupakan perkumpulan cara yang telah menjadi pegangan bagi kehidupan politik bangsanya.

f. Cholisin (2000) mengemukakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik, budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasional)

Beberapa aspek penting dari sosialisasi politik:

- a. sosialisasi politik merupakan proses belajar, belajar dari pengalaman
- b. sosialisasi politik berlangsung tidak hanya pada usia dini dan remaja tetapi tetap berlanjut sepanjang kehidupan
- c. memberikan hasil belajar yang berupa informasi, pengetahuan, sikap, motif, nilai-nilai yang tidak hanya berkaitan dengan individu tetapi juga dengan kelompok
- d. sosialisasi politik merupakan pra kondisi bagi aktitas sosial politik

Tipe sosialisasi politik adalah bagaimana cara atau mekanisme sosialisasi politik itu berlangsung. Tipe sosialisasi politik dapat disebut pula dengan mekanisme sosialisasi politik.

Ada dua tipe sosialisasi politik yaitu;

- a. sosialisasi politik tidak langsung
- b. sosialisasi politik langsung

Yang dimaksud sosialisasi politik tidak langsung adalah warga pada mulanya berorientasi pada hal-hal yang bukan politik (non politik) namun kemudian mempengaruhinya untuk memiliki orientasi politik. Jadi dalam sosialisasi politik tidak langsung ini melalui dua tahap yaitu

- 1) tahap pertama berorientasi pada non politik
- 2) tahap kedua orientasi pertama ia gunakan untuk orientasi pada politik

Sosialisasi politik secara tidak langsung ini dapat dilakukan melalui

- 1) pengalihan hubungan antar individu

Hubungan antar individu yang pada mulanya tidak berkaitan dengan politik namun nantinya akan berpengaruh ketika berhubungan atau berorientasi

dengan kehidupan politik. Contoh ; hubungan siswa dengan guru nantinya akan membentuk orientasi siswa manakala ia bertemu atau berhubungan dengan bupati

#### 2) magang

Magang merupakan bentuk aktifitas sebagai sarana belajar. Magang ditempat-tempat tertentu atau organisasi non politik nantinya akan mempengaruhi orang ketika berhubungan dengan politik. Contoh : siswa ikut organisasi Pramuka, PKS, dan Osis. Organisasi ini juga tempat pembelajaran politik. Siswa akan belajar rapat, melakukan voting, membuat putusan dan sebagainya. Kegiatan ini akan sangat membantu manakala siswa nanti benar-benar terjun di masyarakat dan politik.

#### 3) Generalisasi

Menurut tipe ini, kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini yang sebenarnya tidak berkaitan dengan politik dapat mempengaruhi orang untuk berorientasi pada obyek politik tertentu. Misalnya ; warga memiliki kepercayaan bahwa semua orang pada dasarnya baik, maka kepercayaan ini akan menjadikan ia berprasangka baik terhadap semua pejabat negara . Sebaliknya jika orang berpendapat bahwa semua orang pada dasarnya buruk, maka ia akan hati-hati manakala bertemu dengan pejabat. Jadi kepercayaan atau nilai-nilai yang diyakini *digeneralisasikan* pada kehidupan politik.

#### c. Sosialisasi politik langsung

Dalam tipe ini, sosialisasi politik berlangsung dalam satu tahap saja yaitu bahwa hal-hal yang dioreintasikan, yang ditransmisikan adalah hal-hal yang bersifat politik.

Sosialisasi politik langsung dapat dilakukan melalui

##### 1) Peniruan perilaku (imitasi)

Proses menyerap atau mendapatkan orientasi politik dengan cara meniru orang lain. Yang ditiru tidak hanya pandangan politik, tetapi juga bisa sikap-sikap politik, keyakinan politik, harapan mengenai politik, tingkah laku politik serta ketrampilan dalam berpolitik. Contoh; seorang remaja akan mendukung calon bupati karena orang tuanya juga mendukung si calon bupati tersebut

##### 2) Sosialisasi antisipatori

Sosialisasi politik dengan cara belajar bersikap dan berperilaku seperti tokoh politik yang diidealkan. Pada umumnya anak atau remaja mengidealkan seorang tokoh serta ia bila dewasa berkeinginan seperti tokoh tersebut. Maka yang dilakukan adalah belajar bersikap dan berpandangan layaknya si tokoh, dalam hal ini tokoh atau pemimpin politik. Misal, seorang remaja belajar bersikap dan cara berbicara seperti presiden sebab ia memang mengidealkan peran itu.

##### 3) Pendidikan politik



Sosialisasi politik melalui pendidikan politik adalah upaya yang secara sadar dan sengaja serta direncanakan untuk menyampaikan, menanamkan dan membelajarkan anak untuk memiliki orientasi-orientasi politik tertentu. Pendidikan politik bisa dilakukan melalui sekolah, organisasi, partai politik, media massa, diskusi politik, serta forum-forum yang sengaja dirancang untuk penyampaian orientasi politik.

#### 4) Pengalaman politik

Pengalaman politik adalah belajar langsung dalam kegiatan-kegiatan politik atau kegiatan yang sifatnya publik. Terlibat langsung dalam kegiatan partai politik adalah contoh mendapatkan pengalaman politik.

**Apa hubungan pendidikan politik dengan sosialisasi politik menurut anda?  
Sebelum menjawab, buatlah dulu skema dari uraian di atas!**